

DAFTAR PUSTAKA

- Achin, Hartono. 2018. "Teori Legilasi." *Hartonoachien.com*. Diakses 12 Oktober 2025. <https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-legislasi/>
- Addy Listya Wardhani, Lita Tyesta, dan Luthfi Hafidz Rafsanjani. 2024. "Desain Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Pemerintah: CERIM-Gov." *KNAPHTN*, Vol. 2, No. 1. Diakses 12 November 2025. <https://doi.org/10.55292/h54ew802>
- Achien, Hartono. 2018. "Teori Legilasi." *Hartonoachien.com*. Diakses 12 Oktober 2025.
- alaydrus, Anwar, dkk. 2023. *Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Penerbit Adab.
- al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 27–29.
- al-Zuhayli, Wahbah, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Jilid VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 Aulia, M. Zulfa. n.d. "Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo," 21.
- Awaluddin, Awaluddin, Irzha Friskanov S., dkk. 2019. "Netralitas Sebagai Etika ASN dalam Pilkada." *Surya Keadilan*, Vol. 3, No. 1. Diakses 3 September 2025. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/surya/keadilan/article/view/334>
- Asshiddiqie, Jimly. n.d. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Konsep_Negara_Hukum_Indonesia-libre.pdf*.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at. n.d. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," 14.
- Belly, Isnaeni. 2021. "Trias Politica dan Implikasi Dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," 55.
- Bill Nope, dkk. 2025. "Penafsiran Pembatasan Hak Dipilih bagi Pejabat Negara." *Ius Quia Iustum*, Vol. 32, No. 1. Diakses 4 September 2025.

- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dara Natasya, Alia. 2025. *Ketentuan Cuti Kampanye dalam PP 53/2023 Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Da Silva, George. n.d. "Perspektif Konflik Dalam Pencalonan Anggota Legislatif." Diakses 17 September 2025.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-syifa", 1998, cet. ke-1.
- Dicey, A. V. n.d. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.
- Djazuli., A., Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2013, cet. ke-5.Erika Nugraheny, Dian. n.d. "Sanksi Bagi Menteri yang Tidak Cuti Saat Kampanye Pemilu." *Republika*. Diakses 5 September 2025.
- Fajarlie, Nadia Intan. 2025. "Jokowi Teken PP 53/2023..." *Kompas TV*. Diakses 3 September 2025.
- Ghafur, Jamaludin, dan Allan Fatchan Gani Wardhana. 2017. "Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Kepala Daerah." *Jurnal Novelty*, Vol. 7, No. 1.
- Hadi, Sofyan, dan Hufron. 2024. "Problematika Pembentukan Peraturan oleh Lembaga Peradilan." *KNAPHTN*, Vol. 2, No. 1.
- Hanif David, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." (Jurnal, Lex Renaissance No. 1 Vol. 7, Januari 2022) diakses pada 19 Desember 2025, [21859-Article Text-59169-64127-10-20220308.pdf](#)
- Hassya Arifito Putra, Ramanitya. 2025. *Pengaturan Keikutsertaan Menteri...* Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Hayati, Muslimah. n.d. "Analisis Yuridis Persoalan Cuti bagi Anggota Legislatif dan Eksekutif."

- Hidayat, Ahmad Nuur. 2014. *Analisis Berita Wacana Cuti Kampanye Pejabat Negara*. Skripsi UIN Jakarta.
- Hidayatulloh Permana, Rakhmad. 2025. *detikNews*. Diakses 5 September 2025.
- Hutagalung. n.d. “Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?”
- Iqbal, Muhammad, “Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,” Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cetakan. ke-1.
- Jimly, Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1.
- Kant, Immanuel. 1996. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press. (Translated edition.)
- Kathīr, Ibn, Al-Qur’an, QS. Al-Māidah [5]: 8; *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, jil. 2 Beirut: Dār al-Fikr. Kasmita Kusuma, Fanila. 2019. “Pilkada Serentak Dari Perspektif Konflik,” 31.
- Khilmi. n.d. “Implikasi Pencalonan Menteri ... Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022.”
- Komite PANRB, Humas. 2025. “Netralitas ASN Mendukung Prinsip Demokrasi...” Diakses 5 September 2025.
- Mudammad bin Ismail bin Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis No. 4801, dalam Maktabah asy-Syamilah.
- Muksalmina, Nabhani Yustisi, dkk. 2024. “Netralitas ASN dalam Pilkada.” *Jurisprudensi*, Vol. 1, No. 2.
- Mutia Atipah. 2021. *Pengangkatan Kepala Negara...* Skripsi IAIN Batusangkar.
- Nasution. n.d. “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri... Perspektif Imam Al-Mawardi.”

- Natasya. 2025. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh*.
- Permadi, Hendra, dkk. 2022. "Kajian Komparatif Cuti Presiden Petahana." *Jurnal Pahlawan*, Vol. 5, No. 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023. (beberapa kali muncul → tetap dipisah)
- Putra, Ramanitya Hassya Arifito. 2025. *Pengaturan Keikutsertaan Menteri...*
- Rafsanjani, Luthfi Hafidz, dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. (*lihat entri sebelumnya*)
- Saputri, Rima, dkk. 2024. "Prinsip Non-Diskriminatif..." *USM Law Review*, Vol. 7, No. 3.
- Sani, Rafif, dkk. 2024. "Implikasi Pejabat Publik Berkampanye..." *Socius*, Vol. 1, No. 11.
- Saptomo, Priyo, dkk. 2024. "Eksistensi Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan UU." *Innovative Journal*.
- Susanti, Bivitri. 2017. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jentera*, Vol. 1, No. 2.
- Syamila, Rasji, dan Michellena. n.d. "Penerapan Teori Trias Politika..." 78.
- Tutik. n.d. "Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat..."
- Wafi, Mochamad Adli, dan Deka Oktaviana. 2024. "Pembatasan Wewenang Petahana..." *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 2.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani, dan Jamaludin Ghafur. (sudah tercatat)
- Yudin, Devi Arlina. 2025. "Penerapan Manajemen Talenta ASN..." *Civil Service Journal*, Vol. 19, No. 1.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Pasal 2 dan Pasal 9 Ayat (2).

PP No. 53 Tahun 2023, Pasal 31 dan Pasal 36.